

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Effendi, B. (1993). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Banjarmasin: PT. Alumni Bandung.
- Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria : Sejarah Pembentukan Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- HS, S. (2019). *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Depok: Rajawali Pers.
- Kurniawan, F. (2017). *Akibat Hukum Jual – Beli Tanah Warisan Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Semarang: USM.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Mahmud*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. I. (1998). *Hukum dan Politik Agraria*. Jakarta: Kurnia, Universitas Terbuka.
- Santoso, U. (2014). *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, Cetakan Ke-4.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenafamedia Grup.
- Soekanto, S. (1985). *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono, S. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Sutendi, A. (2010). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Skripsi dan Jurnal

- Ratna, A. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah Akibat Jual Beli Tanpa Izin (Studi*

Kasus Putusan PN Semarang No. 157/Pdt/G/2012/PN.SMG (Skripsi, UNDIP, 2013).

Wijayanti, P, dkk. (2017). *Akibat Hukum Jual Beli Tanah Dan Bangunan Secara Dibawah Tangan Yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Putusan No 416/Pdt/G/2015/PN.Smg.* (Diponegoro Law Jurnal, 2017). Diakses dari: <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/cgi-sys/suspendedpage.cgi>

Oma, R. (2018). *Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara 2018). Diakses dari :

<https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/7182/140200214.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Christian, Y. (2019). *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Di Batalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan, Acta Djurnal* (Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol. 3 No 1, 2019). Diakses dari: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/211/155/>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor 8 Tahun 2012.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (PERKABAN) Nomor 1 Tahun 2006
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

SEMA MA Nomor 4 Tahun 2016